



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4668-4674

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Sistem Pengendalian Internal Dana Pihak Ketiga Pada Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal

Rani Rahman, Adzka Rosa Sanjayyana  
Akuntansi, Universitas Siliwangi  
ranirahman@unsil.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal dana pihak ketiga yang diterapkan di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Karangnunggal. Sistem pengendalian internal ini memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dana pihak ketiga yang meliputi tabungan, deposito, dan produk keuangan lainnya, berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggambarkan fakta dan kejadian yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang didapat dari dokumen dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal telah berjalan dengan baik, di mana pengelolaan dana pihak ketiga dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Faktor kunci keberhasilan sistem ini terletak pada implementasi kontrol yang efektif, serta pemantauan dan evaluasi yang rutin. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk terus meningkatkan sistem pengendalian dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan memperkuat pelatihan bagi petugas terkait.*

*Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Dana Pihak Ketiga, Bank Mandiri Taspen, Kualitatif, Pengelolaan Keuangan.*

### **1. Latar Belakang**

Lembaga perbankan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keuangan di setiap negara. Sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam perekonomian, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penghimpun dan penyalur dana. Proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank mencakup berbagai instrumen, mulai dari tabungan, giro, hingga deposito berjangka, yang dikenal dengan sebutan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK ini, yang merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, sangat penting bagi bank karena menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan kredit yang disalurkan kepada debitur. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menghimpun dan mengelola dana ini menjadi indikator utama dalam penguatan posisi bank di pasar finansial. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana tidak hanya tergantung pada kemampuan dalam menarik nasabah, tetapi juga pada sistem pengelolaan dana yang diterapkan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana pihak ketiga adalah pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang baik berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola secara hati-hati dan tidak disalahgunakan. Pengendalian internal juga berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank, nasabah, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana pihak ketiga menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk menjaga keamanan dan integritas dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank.

Pengendalian internal memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga kestabilan operasional bank. Fungsi pengendalian internal ini melibatkan berbagai elemen, termasuk kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Menurut (Ngurawan, 2021) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan akurasi informasi akuntansi, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Pengendalian internal yang baik akan melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah pemisahan fungsi (segregation of duties), otorisasi yang tepat, pemantauan yang berkesinambungan, serta evaluasi terhadap kinerja dan kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks perbankan, salah satu risiko terbesar yang dapat muncul dalam pengelolaan dana pihak

ketiga adalah risiko operasional. Risiko operasional ini dapat timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Ketika bank gagal mengelola risiko ini dengan baik, kepercayaan nasabah terhadap bank akan terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas bank itu sendiri. Selain itu, bank juga harus menghadapi tantangan dari aspek-aspek lain, seperti perubahan regulasi yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan dana dan kebutuhan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Bank Mandiri Taspen, atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Mantap, adalah salah satu lembaga perbankan yang berfokus pada segmen pasar tertentu, yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pensiunan. Bank ini memiliki fokus yang jelas dalam membantu mengembangkan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi pensiunan dalam mengelola dana mereka. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan profitabilitas, Bank Mandiri Taspen telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam hal volume kredit yang disalurkan maupun dana pihak ketiga yang dihimpun. Salah satu indikator kesuksesan Bank Mandiri Taspen adalah peningkatan laba yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sebagian besar dari pertumbuhan laba ini berasal dari pendapatan bunga yang dihasilkan dari selisih antara bunga yang diterima dari kredit dan bunga yang dibayarkan atas dana pihak ketiga. Dalam hal ini, pengelolaan dana pihak ketiga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pendanaan dan penyaluran kredit. Oleh karena itu, manajemen Bank Mandiri Taspen telah memberikan perhatian besar pada peningkatan volume DPK di setiap kantor cabang mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan target DPK yang harus dicapai oleh masing-masing Kantor Cabang, termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Karangnunggal. Pada tahun 2022, Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal mengalami peningkatan signifikan dalam volume DPK, sesuai dengan instruksi manajemen untuk memperbesar kontribusi dana pihak ketiga dalam mendukung pembiayaan kredit. Namun, dengan meningkatnya volume DPK, muncul juga tantangan baru, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan pengendalian internal agar tetap terjaga pengelolaan yang transparan dan sesuai prosedur. Meskipun volume DPK yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas, tanpa pengendalian internal yang memadai, hal ini dapat membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik yang tidak etis. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KCP Karangnunggal adalah adanya tekanan yang diberikan kepada karyawan untuk mencapai target DPK yang ditetapkan. Tekanan ini dapat menyebabkan karyawan, terutama Customer Service (CS) dan teller yang bertanggung jawab langsung terhadap penghimpunan dana, terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan kebijakan internal. Pentingnya pengendalian internal di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal semakin terlihat ketika mengingat bahwa hanya ada satu pejabat yang memiliki wewenang untuk mengotorisasi dan memverifikasi transaksi, yaitu Kepala KCP. Ketika Kepala KCP tidak berada di kantor, proses otorisasi dan verifikasi dapat terhambat, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi risiko operasional yang timbul akibat ketidakhadiran pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal terhadap dana pihak ketiga, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengendalian internal tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas bank. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajerial atau organisasi, sistem merujuk pada sekumpulan bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jerry FutzGerald (dikutip oleh Hutahaean, 2014) menjelaskan bahwa sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang bersama-sama menyelesaikan suatu kegiatan atau sasaran tertentu. (Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2018) mendefinisikan sistem sebagai himpunan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Amsyah (Hanifah et al., 2023) menyebutkan bahwa sistem adalah seperangkat objek yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung, terkait, dan mendukung, yang disatukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan yang terstruktur dan terorganisir (Alminanda Marfuah, 2018). Dalam hal ini, tujuan akhir dari sistem adalah efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran, dengan berbagai elemen sistem berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut (Zamzami & Arifin Faiz, 2015)), pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya dengan cara yang efisien dan efektif. (Rahmi, 2017) mengemukakan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk memberikan

jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, (Ridzal et al., 2022) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan memastikan dipatuhinya kebijakan manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kestabilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah akurat dan dapat diandalkan, memastikan bahwa operasi perusahaan berlangsung secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada. (Zamzami & Arifin Faiz, 2015) membagi tujuan pengendalian internal menjadi tiga aspek penting: (1) Reliabilitas pelaporan keuangan, yang memastikan laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku, (2) Efisiensi dan efektivitas operasi, yang mendorong penggunaan sumber daya secara optimal, dan (3) Ketaatan pada hukum dan peraturan, yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi yang berlaku, baik yang berkaitan langsung dengan akuntansi maupun peraturan lainnya seperti perlindungan lingkungan dan hak sipil. (Ridzal et al., 2022) lebih lanjut mengidentifikasi dua kategori pengendalian internal, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang bertujuan untuk menjaga aset dan mengecek keandalan laporan keuangan. Pengendalian internal administratif bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam operasional dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Komponen dari pengendalian internal juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem ini. Menurut (Penulis et al., 2020), komponen utama pengendalian internal mencakup struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang jelas, serta praktik yang sehat dalam pelaksanaan operasional. Sementara itu, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang harus ada dalam setiap organisasi, yaitu (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional bank, salah satunya adalah penyaluran kredit. Kasmir (2015) menjelaskan bahwa sumber dana utama bank berasal dari masyarakat luas, yang dapat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga ini sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional bank, termasuk dalam membiayai sektor riil melalui penyaluran kredit kepada nasabah. Beberapa pengertian mengenai dana pihak ketiga disampaikan oleh (Dwi Sukmawati et al., 2023) yang menyebutkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk pendanaan sektor riil. Dana tersebut dihimpun oleh bank melalui berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan giro, yang dapat ditarik kembali oleh nasabah pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga atau capital gain. Sementara itu, (Vera Yenni, 2017) mengemukakan bahwa dana pihak ketiga mencakup dana yang diperoleh dari masyarakat, baik individu, perusahaan, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lainnya. Bank mengelola dana pihak ketiga ini melalui tiga jenis simpanan utama, yaitu giro, tabungan, dan deposito (Anggriany & Hasnawati, 2023). Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Giro merupakan sumber dana jangka pendek dengan biaya yang rendah dan digunakan untuk transaksi yang lebih fleksibel. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya terbatas oleh syarat-syarat tertentu, dan biasanya menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan giro. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, yang tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Deposito menawarkan bunga yang lebih tinggi, dan terdapat beberapa jenis deposito seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call (Margaretha, 2013). Bagan alir data (Data Flow Diagram, DFD) adalah alat untuk menggambarkan aliran data dan proses dalam suatu sistem. (Ilmiah & Akuntansi, 2021) menjelaskan bahwa bagan alir adalah model yang menggambarkan aliran data dan proses yang digunakan untuk mengolah data dalam suatu sistem. Bagan alir membantu memvisualisasikan langkah-langkah atau proses yang terjadi dalam sistem, serta bagaimana data bergerak melalui berbagai tahapan. Setiap simbol dalam bagan alir menggambarkan kegiatan atau proses tertentu yang terkait dengan pengolahan data. (dan Edi Mulyanto, n.d.) mengemukakan bahwa flowchart atau bagan alir adalah skema yang memperlihatkan urutan instruksi atau kegiatan yang saling berhubungan antar proses. Setiap simbol pada bagan alir menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam sistem, dan penghubung antar simbol menunjukkan urutan logis dalam pelaksanaan prosedur. Bagan alir data sering digunakan dalam desain sistem untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah atau proses yang terlibat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi sistem.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengendalian internal Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena lebih fokus pada

eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang ada dan untuk menggali wawasan baru mengenai pengelolaan dana pihak ketiga melalui pengalaman individu dan analisis secara intensif. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif, yang berorientasi pada pemahaman menyeluruh mengenai kondisi yang ada, dengan pengumpulan data yang bersifat naratif dan berfokus pada karakteristik serta dinamika yang terlibat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Cabang Pembantu Karangnunggal, Control Unit Partner (CUP), serta Flying Kantor Cabang Tasikmalaya untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai pengendalian internal Dana Pihak Ketiga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan internal perusahaan, seperti struktur organisasi dan laporan Dana Pihak Ketiga, yang memberikan gambaran lebih lanjut mengenai mekanisme dan kebijakan yang diterapkan di bank tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan artikel, yang memberikan dasar teori mengenai pengendalian internal dan manajemen Dana Pihak Ketiga. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan operasional di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal, serta wawancara dengan pihak terkait untuk menggali informasi lebih dalam mengenai implementasi sistem pengendalian internal yang ada. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang mendukung analisis penelitian. Penelitian ini berfokus pada sistem pengendalian internal Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri Taspen, dengan tujuan untuk memahami bagaimana sistem ini diterapkan dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti tabungan, deposito, dan giro. Peneliti juga ingin menggali lebih dalam mengenai efektivitas pengendalian internal tersebut dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian internal yang baik, serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja keuangan di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal.

### 3. Hasil dan Diskusi

Sistem Pengendalian Internal Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal telah diterapkan dengan cukup efektif, dengan melibatkan berbagai unit yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam memastikan setiap transaksi dan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan. Secara umum, alur sistem pengendalian internal ini dimulai dengan Customer Service yang bertugas melakukan verifikasi formulir pembukaan rekening dan dokumen terkait, serta bertanggung jawab atas pengelolaan buku tabungan dan Bilyet Deposito. Setelah itu, Teller memverifikasi dan memproses transaksi tunai maupun non-tunai, serta bertanggung jawab atas penyimpanan uang dan pengarsipan transaksi. Pimpinan unit memiliki peran sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang diproses oleh Customer Service dan Teller sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, Control Unit Partner (CUP) bertugas melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan Risk Business Control (RBC) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap operasional cabang agar selalu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip maker-checker terlihat jelas dalam pembagian tugas antara Customer Service dan Teller. Sebagai contoh, Customer Service bertanggung jawab untuk memproses pembukaan rekening, namun tidak memiliki kewenangan untuk memproses transaksi tunai. Sebaliknya, Teller hanya dapat memproses transaksi tunai dan melakukan cross-selling produk Dana Pihak Ketiga, namun tidak dapat memproses pembukaan rekening tanpa verifikasi dari Customer Service. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional dijalankan dengan akurat dan sesuai dengan kebijakan bank. Selain itu, Kepala Kantor Cabang Pembantu Karangnunggal juga berfungsi sebagai checker yang memastikan bahwa seluruh dokumen dan laporan transaksi harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap laporan yang dibuat oleh Customer Service dan Teller diperiksa oleh Kepala Kantor Cabang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Setelah itu, Control Unit Partner melakukan pemeriksaan H+1 dan Risk Business Control melakukan pemeriksaan lebih lanjut setiap tiga bulan sekali untuk memastikan pengarsipan data yang dilakukan oleh Customer Service dan Teller sudah sesuai. Meskipun demikian, peneliti mencatat bahwa adanya target funding yang diberikan kepada Customer Service dan Teller menjadi tantangan tambahan dalam pekerjaan mereka. Meskipun tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada nasabah, target ini memaksa mereka untuk berfokus pada pencapaian angka tertentu yang mengarah pada peningkatan target Dana Pihak Ketiga. Hal ini bisa menambah beban pekerjaan mereka, bahkan berpotensi menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pencapaian target dan pemeliharaan kualitas layanan agar tidak mengorbankan tugas utama mereka. Namun, meskipun terdapat tambahan tugas tersebut, pada dasarnya target yang diberikan adalah bagian dari tanggung jawab yang diamanatkan dalam jobdesk mereka. Hal ini tidak merubah prinsip pemisahan fungsi

yang tegas dalam pengendalian internal dan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh bank. Sehingga, meskipun tantangan tersebut ada, secara keseluruhan, sistem pengendalian internal Dana Pihak Ketiga tetap berjalan dengan baik dan efektif, dengan mekanisme kontrol yang kuat di setiap tahapnya. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melebihi kewenangan petugas diproses dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap transaksi, baik berupa pembukaan rekening atau transaksi setoran tunai maupun pemindahbukuan, harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Misalnya, jika jumlah dana yang ditempatkan dalam pembukaan rekening melebihi batas kewenangan Customer Service, maka otorisasi dari pimpinan unit diperlukan. Hal serupa berlaku untuk transaksi setoran tunai atau pemindahbukuan yang dilakukan oleh teller. Batas kewenangan untuk petugas teller di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal berbeda berdasarkan jabatan, dengan teller senior memiliki batas kewenangan tertinggi dalam memproses transaksi tunai dan non-tunai. Sebagai contoh, untuk transaksi tunai, teller senior dapat menangani transaksi hingga 20 juta Rupiah, sementara untuk teller associate, batas kewenangannya hanya 5 juta Rupiah. Adapun kewenangan otorisasi dimiliki oleh pejabat yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, seperti Direksi dengan kewenangan tak terbatas, hingga Pimpinan KCP yang memiliki kewenangan yang lebih rendah dibandingkan pejabat lainnya. Kewenangan ini penting untuk memastikan kontrol yang tepat dalam setiap transaksi. Selain itu, dalam proses otorisasi, ada beberapa aspek yang diperiksa secara teliti, seperti kecocokan tanggal, nominal dana, identitas nasabah, serta tujuan transaksi. Semua transaksi yang melewati batas kewenangan petugas akan mendapatkan tanda tangan otorisasi oleh pejabat yang bersangkutan. Pada akhir hari, pimpinan unit bertanggung jawab untuk memeriksa kembali seluruh transaksi dan bukti pendukungnya untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data. Kewenangan tanda tangan di Bank Mandiri Taspen diatur dengan tegas, termasuk untuk tanda tangan pembukaan rekening tabungan dan Bilyet Deposito. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan tanda tangan, seperti Kepala Cabang dan Kepala Unit, bertanggung jawab untuk menandatangani dokumen sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan. Proses otorisasi dan verifikasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses verifikasi di Bank Mandiri Taspen melibatkan pemeriksaan kelengkapan formulir, kesesuaian data yang diinput di sistem dengan dokumen pendukung, dan keabsahan tanda tangan. Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilakukan dengan menggunakan tinta warna yang berbeda, yaitu hitam untuk maker, biru untuk checker, dan merah untuk Control Unit Partner serta Risk Business Control sebagai checker. Hal ini membantu untuk membedakan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahap verifikasi. Jika pejabat yang berwenang sedang tidak hadir, otorisasi dan verifikasi akan dilakukan oleh pejabat alternate yang ditunjuk. Surat permintaan otorisasi atau Berita Acara Serah Terima (BAST) akan dibuat untuk memastikan kelancaran proses otorisasi selama pejabat berwenang tidak ada. Dengan adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang jelas dan terstruktur ini, Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal memastikan bahwa setiap transaksi Dana Pihak Ketiga tercatat dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan. Proses ini juga membantu dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap keamanan transaksi yang dilakukan di bank. Hasil wawancara dengan beberapa pihak di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana pengendalian internal Dana Pihak Ketiga dijalankan. Dalam wawancara dengan Bapak Dede Apriandani selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Karangnunggal, beliau menjelaskan bahwa pemisahan fungsi di Bank Mandiri Taspen dilakukan dengan jelas. Fungsi checker dan maker dipisahkan dengan baik, di mana Customer Service dan teller berperan sebagai maker, sedangkan kepala unit bertugas sebagai checker. Meskipun ada target funding, pemisahan fungsi tetap diterapkan dengan tegas karena setiap transaksi harus melalui otorisasi dan verifikasi dari pejabat yang berwenang.

Proses penghimpunan Dana Pihak Ketiga dimulai dari pelayanan Customer Service, yang kemudian diverifikasi dan diotorisasi oleh pimpinan unit. Jika nasabah melakukan setoran, prosesnya dilanjutkan di teller. Dalam hal ini, petugas yang bertanggung jawab untuk otorisasi dan verifikasi data sangat penting untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi yang diberikan. Terkait dengan masalah pengganti pejabat yang berwenang, Bapak Dede Apriandani menjelaskan bahwa jika pejabat yang berwenang berhalangan hadir, pejabat alternate akan menggantikannya. Proses ini dilengkapi dengan surat permintaan otorisasi jika pejabat keluar dan Berita Acara Serah Terima (BAST) jika pejabat berhalangan hadir. Ibu Pevi Fuzi Lestari, Control Unit Partner di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal, menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Dana Pihak Ketiga dilakukan secara rutin oleh pimpinan unit pada H+0, oleh Control Unit Partner pada H+1, dan evaluasi kontrol dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui control testing oleh Risk Business Control (RBC). Tidak ditemukan hambatan dalam proses pengendalian internal, meskipun ada gesekan kontrol antara bisnis dan operasional. Ibu Sunira Puspita, yang merupakan Flying Kantor Cabang Tasikmalaya, menjelaskan bahwa dalam proses pembukaan rekening, data nasabah yang harus diverifikasi meliputi nama, tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, dan nomor handphone.

Meskipun ada target funding, pekerjaan yang dilakukan oleh petugas tidak menyebabkan overload, karena semua tugas sudah sesuai dengan jobdesk yang ada. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hambatan yang muncul, Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal telah menjalankan pengendalian internal dengan baik. Komunikasi yang efektif dan dokumentasi yang lengkap menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan kepercayaan nasabah. Pemisahan fungsi yang jelas antara checker dan maker serta proses verifikasi yang ketat membantu memastikan bahwa setiap transaksi Dana Pihak Ketiga terlaksana dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

#### 4. Kesimpulan

Proses pengendalian internal Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal telah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun terdapat beberapa hambatan yang timbul, terutama terkait dengan gesekan kontrol antara fungsi bisnis dan operasional. Hambatan tersebut umumnya berkaitan dengan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito di luar kantor serta permintaan nasabah untuk didahulukan dalam antrian. Meskipun demikian, solusi yang diterapkan seperti dokumentasi yang baik, pengisian logbook yang akurat, serta komunikasi yang transparan antara petugas dan nasabah, dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pemisahan fungsi yang jelas antara checker dan maker di Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal, serta kewenangan otorisasi dan verifikasi yang diterapkan secara ketat, memperkuat sistem pengendalian internal yang ada. Petugas yang terlibat dalam proses ini, seperti Customer Service, teller, dan pimpinan unit, menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Proses penghimpunan Dana Pihak Ketiga berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, di mana Customer Service berfungsi sebagai penghubung awal, dan transaksi yang dilakukan harus selalu mendapatkan otorisasi serta verifikasi dari pihak yang berwenang. Jika terjadi ketidakhadiran pejabat yang berwenang, pejabat alternate dengan prosedur yang telah diatur akan mengambil alih otorisasi dan verifikasi. Meskipun tidak ada hambatan yang signifikan dalam pengendalian internal, gesekan kontrol antara fungsi bisnis dan operasional tetap menjadi tantangan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan komunikasi yang baik dan pengaturan yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pengendalian yang ada. Secara keseluruhan, Bank Mandiri Taspen KCP Karangnunggal telah melaksanakan sistem pengendalian internal Dana Pihak Ketiga dengan baik, menjaga integritas dan keamanan transaksi, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul melalui pemisahan tugas yang jelas, otorisasi yang tepat, dan verifikasi yang ketat. Praktik ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

#### Referensi

- Alminanda Marfuah, P. (2018). THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN MODERATING THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORT. In *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* (Vol. 16, Issue 2). <http://journal.ummg.ac.id/index.php/bisnisekonomi>
- Anggriany, E., & Hasnawati. (2023). PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN INOVASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239–1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- dan Edi Mulyanto, A. (n.d.). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA BUMDES BANTAL ASEMBAGUS SITUBONDO* (Vol. 3, Issue 1).
- Dwi Sukmawati, N., Ermayanti Susilo, D., & PGRI Dewantara Jombang, S. (2023). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT JOMBANG*. 7(3), 2023.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PERAN AUDIT INTERNAL, KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *JURNAL ECONOMINA*, 2(6), 1318–1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Ilmiah, J., & Akuntansi, K. (2021). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FUNGSI PENERIMAAN KAS PADA RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA* (Vol. 14, Issue 1). <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Margaretha, R. (2013). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. SINAR GALESONG PRIMA CABANG MANADO*.
- Ngurawan, Y. (2021). *EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK SULUT GO*.

- Penulis, N., Anastasia, M., Rahmayanti, N. P., Anizar, S., & Andriani, N. W. (2020). Sistem Pengendalian Intern Pembelian Dan Penjualan Barang Pada CV. Intiga Harapan Banjarbaru Corresponding Author Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, Indonesia. *Tahun, X(2)*, 2715–7016.
- Rahmi, F. (2017). *DAMPAK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PRILAKU TIDAK ETIS, DAN MORALITAS MANAJEMEN TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN DEVELOPER DI PEKANBARU*.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner, 6(3)*, 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, P. (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENGGAJIAN Amirah Yayang Intishar & Muanas. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* (Vol. 6, Issue 2).
- Vera Yenni. (2017). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN*.
- Zamzami, F., & Arifin Faiz, I. (2015). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL: STUDI KASUS PADA SEBUAH PERGURUAN TINGGI NEGERI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 6*.